

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun ke Dua dari Rencana Strategis Organisasi Kerja Perangkat Daerah (Renstra –PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 – 2022, dengan Mempedomani Rancangan Awal RKPD tahun 2017, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 – 2025. Renja PD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun – tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang mengemukakan bahwa Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2017-2022 dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja PD menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dan kegiatan PD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program PD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra PD serta sebagai proses penyusunan RAPBD.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja (Renja) PD dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pada Tahun 2018 ini merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan PD, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan yang ditetapkan. Dalam hal ini dilakukan sebagai mana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi Renstra pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrembang dan program program kegiatan yang diajukan oleh setiap bidang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1213);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor (1308)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polis Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 adalah untuk menetapkan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Diskominfo dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 adalah untuk :

- Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018.
- Menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah, serta tugas lain yang diberikan kepada Diskominfo sesuai aturan yang berlaku.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Fungsi PD Identifikasi permasalahan berdasarkan Tupoksi
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2017

**2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2017**

Pengukuran pelaksanaan renja Dinas Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan mengacu kepada penetapan Renstra Tahun 2013-2017 yang pada saat ini mengacu kepada RKPD 2005-2025 Kabupaten Barito Kuala. Capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok: masukan (input), proses (outputs) dan hasil (outcomes). Sedangkan Organisasi pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk orang, buah, hari, persen dan sebagainya.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 yang mengacu kepada RPJP 2005 - 2025, Visi Misi dan tujuan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 merupakan tahun transisi antara RPJMD 2012-2017 dan RPJMD 2017-2022 serta Renstra Dishubkominfo 2012-2017 dan Renstra Diskominfo 2017-2022 pasca di berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dituangkan dalam Evaluasi Renja sampai dengan tahun 2018. Hasil pengukuran evaluasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra Diskominfo Kabupaten Barito Kuala s/d Tahun 2017

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | TARGET CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2017 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 | | | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2018) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN | | |
|------|---|-------------------------------------|---|--|---|-----------------------|---|--|---|-----------------------|
| | | | | TARGET RENJA PD TAHUN 2017 | REALISASI RENJA PD TAHUN 2017 | TINGKAT REALISASI (%) | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2018 | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENTRA (%) | |
| (1) | (2) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| 0 | Non Urusan | | | | | | | | | |
| 0 | - | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 0% | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | surat menyurat | 400 lembar | 1 Orang 400 Lembar | 1 Orang 400 Lembar | 100% | 1 Orang 400 Lembar |
| 0 | 0 | 1 | 2 | Penyediaan Jasa Komuniaksi sumber daya air dan listrik | Biaya listrik, air dan telpon | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 Bulan |
| 0 | 0 | 1 | 6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Operasional | Pemeliharaan kendaraan dinas | 4 unit | 4 Uniiit | 4 Uniiit | 100% | 4 Unit |
| 0 | 0 | 1 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Peneydiaan alat tulis kantor | 31 jenis | 31 Jenis | 31 Jenis | 100% | 31 Jenis |
| 0 | 0 | 1 | 11 | Penyediaan barang cetak dan penggandaan | Barang cetak dan penggandaan | 10 jenis | 10 Jenis | 10 Jenis | 100% | 10 Jenis |
| 0 | 0 | 1 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | Penyediaan bahan buku bacaan penyediaan bahan bacaan koran 2 SKH | 10 buku 12 bulan | | | | 10 Buku 12 Bulan |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|--|--|--------------------|-----------|-----------|-------|------------------------|--|--|
| 0 | 0 | 1 | 17 | Penyediaan makanan dan minum | Makanan dan minuman harian,tamu, rapat dan kegiatan | 624 Porsi | 624 porsi | 624 porsi | 100 % | 4.761 pors | | |
| 0 | 0 | 1 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 34 OH/OK | 34 OH/OK | 34 OH/OK | 100% | 55 OK | | |
| 0 | 0 | 1 | 20 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 40 OH | | | | | | |
| 0 | 0 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat Penggunaan Sarana dan Prasarana. | 0% | | | | | | |
| 0 | 0 | 2 | 5 | Pengadaan kendaraan dinas / operasional | Pengadaan kendaraan roda dua (7 buah) dan roda empat (1 buah) | 7 unit | | | | 7 Unit | | |
| 0 | 0 | 2 | 7 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tersediannya perlengkapan gedung kantor | 6 jenis | | | | | | |
| 0 | 0 | 2 | 9 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Peralatan gedung kantor | 6 jenis | 6 Jenis | 6 Jenis | 100% | 11 Jenis | | |
| 0 | 0 | 2 | 10 | Pengadaan mebeleur | Meja dan kursi kantor Kursi rapat | 40 buah 20 buah | | | | 40 buah 20 buah | | |
| 0 | 0 | 2 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Petugas pemelihara gedung kantor Rehab berat/sedang gedung kantor | 6 Jenist | | | | 365 OH 144 OB | | |
| 0 | 0 | 2 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Pemeliharaan kendaraan bermotor | 4 buah | | | | 13 Kali 1.160 Liter | | |
| 0 | 0 | 2 | 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Pemeliharaan gedung kantor | 6 Jenis | | | | | | |
| 0 | 0 | 5 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat. | 0% | | | | | | |
| 0 | 0 | 5 | 3 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah aparatur yang mengikuti Bintek | 10 OH | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|--|--|--------------------------|--|--|------|--|--|--|
| 4 | # | 18 | 02 | Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Honorarium Tim Pengelola Website Kab. Barito Kuala | | 3.360.000 192 OB 69.000.000 192 OB | 3.360.000 192 OB 69.000.000 192 OB | 100% | 3.360.000 192 OB 69.000.000 192 OB | | |
| 4 | # | 18 | 03 | Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat | SKPDPembuatan dan pemasangan spanduk Biaya alat tulis kantor Honorarium narasumber Biaya foto copy Biaya perjalanan dinas Biaya penjilidan Biaya makan dan minum | | 240.000 1 Lembar 760.000 40 Buah 1.000.000 4 OJ 500.000 2000 Lembar 2.500.000 10 OH 200.000 40 Buah 1.250.000 50 Porsi | 760.000 40 Buah 1.000.000 4 OJ 240.000 1 Lembar 2.500.000 10 OH 500.000 2000 Lembar 1.250.000 50 Porsi 200.000 40 Buah | 100% | 760.000 40 Buah 1.000.000 4 OJ 240.000 1 Lembar 2.500.000 10 OH 500.000 2000 Lembar 1.250.000 50 Porsi 200.000 40 Buah | | |
| 4 | # | 19 | | Program Pengelolaan Informasi Publik | Peningkatan ketersediaan dan akses informasi publik | 0 Pesentase (%) | | | | | | |
| 4 | # | 19 | | Pembinaan dan Pengembangan Media Center Kabupaten | Jumlah operasional Media Center "MC Selidah" | 12 bulan | | | | | | |
| 4 | # | 19 | | Penyebarluasan informasi melalui media baru | Jumlah Informasi yang disebarluaskan melalui website pemerintah kabupaten | 305 Informasi | | | | | | |
| 4 | # | 19 | | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Informasi | Jumlah peserta bintek Pengelolaan PPID Pembantu Jumlah SDM peserta bintek/workshop Jurnalistik/pengelola informasi | 63 peserta 40 peserta | | | | | | |
| 4 | # | 19 | | Penyebarluasan informasi melalui media luar ruangan | Jumlah jenis media informasi yang digunakan | 6 Jenis | | | | | | |
| 4 | # | 19 | | Pembinaan dan pengembangan penyebarluasan informasi melalui Media Pertunjukan Rakyat (Pentura) | Jumlah partisipasi pada event Pekan Informasi Nasional (PIN) | 1 event | | | | | | |
| 4 | # | 20 | | Program Pengelolaan Komunikasi Publik | peningkatan Layanan Komunikasi Publik | 0 Persentasi | | | | | | |

| | | | | | (%) | | | | | | | |
|---|---|----|--|---|--|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 4 | # | 20 | | Sosialisasi Internet Sehat | Jumlah peserta sosialisasi internet sehat | 450 peserta | | | | | | |
| 4 | # | 20 | | Pembentukan dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk | 5 Kelompok | | | | | | |
| 4 | # | 20 | | Pelayanan Pengaduan masyarakat | Persentase pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti | 100 Persen | | | | | | |
| 4 | # | 21 | | Program Pengembangan Fasilitas Kewajiban Pelayanan Universal/Universail Service Obligation (KPU/USO) | Menurunnya jumlah desa blankspot | 0 Jumlah | | | | | | |
| 4 | # | 21 | | Fasilitas penyediaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah KPU/USO | Jumlah desa yang terlayani jaringan telekomunikasi | 0 | | | | | | |
| 4 | # | 21 | | Pembinaan dan pengembangan Fasilitas Akses informasi publik | Jumlah fasilitas akses internet di area publik | 3 titik | | | | | | |
| 4 | # | 21 | | Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | Jumlah Menara Telekomunikasi/BTS yang sesuai cellplan | 50 OH | | | | | | |
| 4 | # | 21 | | Pembinaan dan pengembangan internet Desa (Desa Broadband) | Jumlah desa yang terkoneksi dengan jaringan internet | 50 OH | | | | | | |
| 4 | # | 22 | | Program Pengembangan Infrastruktur TIK | peningkatan ketersediaan infrastruktur Teknologi Informatika | 0 Persen | | | | | | |
| 4 | # | 22 | | Pemeliharaan infrastruktur jaringan e-Government Kabupaten | Frekuensi pemeliharaan titik interkoneksi jaringan e-Gov Kabupaten | 53 titik | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|--|---|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 4 | # | 22 | Pembinaan dan Pengembangan Server Pemerintah Kabupaten | Tersedianya ruang server & peralatan server pemerintah kabupaten | 1 Unit | | | | | | |
| 4 | # | 22 | Penyediaan infrastruktur jaringan e-Government Kabupaten | Jumlah titik interkoneksi jaringan e-Gov yang berfungsi dengan baik | 53 titik | | | | | | |
| 4 | # | 22 | Penyediaan Bandwidth Internet | Jumlah kapasitas bandwidth | 400 Mbps | | | | | | |
| 4 | # | 23 | Program Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi | ketersediaan aplikasi, sistem informasi dan data elektronik terintegrasi | 0% | | | | | | |
| 4 | # | 23 | Penyediaan Layanan Portal Data "Batola One Data" | Jumlah data base pada portal data Kabupaten yang tersedia dan akurat | 100 database | | | | | | |
| 4 | # | 23 | Penyediaan aplikasi pelayanan publik | Jumlah Aplikasi pelayanan publik yang tersedia | 3 Aplikasi | | | | | | |
| 4 | # | 23 | Penyediaan Aplikasi pemerintahan | Jumlah Aplikasi pemerintahan yang tersedia | 3 Aplikasi | | | | | | |
| 4 | # | 23 | Penyediaan Aplikasi Smart City Command Center | Jumlah Aplikasi Smart City Command Center | 3 Aplikasi | | | | | | |
| 4 | # | 24 | Program Pengembangan Ekosistem dan Tata Kelola e-Government | Jumlah SKPD yang melaksanakan e-Government | 0% | | | | | | |
| 4 | # | 24 | Perumusan regulasi dan kebijakan Tata kelola e-Government | Jumlah dokumen usulan perumusan regulasi dan kebijakan tata kelola e-Government yang disetujui dan ditetapkan | 4 Dokumen | | | | | | |
| 4 | # | 24 | Pengembangan SDM TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat | Jumlah peserta peningkatan kapasitas SDM TIK | 150 orang | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|---|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4 | # | 24 | Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) | Jumlah GCIO yang bersertifikat | 5 orang | | | | | | |
| 4 | # | 24 | Penyusunan Detail Enggining Desain Smart City | Jumlah Detail Enggining Desain yang tersedia | 3 Dokumen | | | | | | |
| 4 | # | 24 | Pembinaan dan pengembangan Website Desa | Jumlah website desa yang menggunakan domain desa.id | 74 website | | | | | | |
| 4 | # | 24 | Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) | Jumlah dokumen evaluasi SPBE yang tersedia dan valid Jumlah rapat koordinasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 6 Dokumen 3 kali | | | | | | |
| 4 | # | 24 | Kerjasama pengembangan smart city/ smart regency | Jumlah Dokumen kerjasama | 1 Dokumen | | | | | | |
| 4 | # | 24 | Pengelolaan Nama Domain yang ditetapkan pemerintah pusat (baritokualakab.go.id) | Jumlah Subdomain yang digunakan | 78 Subdomain | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 4 | # | | Statistik | | | | | | | | |
| 4 | # | 15 | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | Data sektoral kabupaten yang akurat | 0% | | | | | | |
| 4 | # | 15 | Pengumpulan dan pengolahan data sektoral kabupaten | Buku data sektoral kabupaten | 1 buku | | | | | | |
| 4 | # | | Persandian | | | | | | | | |
| 4 | # | 1 | Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi | SKPD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | 0 Persentase (%) | | | | | | |
| 4 | # | 1 | Pengelolaan informasi pemerintah daerah yang berklasifikasi diamankan | Jumlah pendistribusian informasi daerah berklasifikasi diamankan | 255 Informasi | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| 4 | # | 1 | Sosialisasi/Bintek pengelolaan keamanan informasi dan persandian | Jumlah peserta bintek yang paham pengelolaan keamanan informasi dan persandian | 40 peserta | | | | | | |
| 4 | # | 1 | Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi Sandi (JKS) | Persentase ketersediaan peralatan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) | 9 unit | | | | | | |
| 4 | # | 1 | Fasilitasi pengelolaan keamanan sistem informasi SKPD | Persentase fasilitasi penyelesaian kasus keamanan informasi | 100 Persen | | | | | | |
| 4 | # | 1 | Penyertaan diklat peningkatan kapasitas sandiman Kabupaten | Jumlah Sandiman yang bersertifikat | 2 orang | | | | | | |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistic dan persandian, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2022.

Kinerja pelayanan Diskominfo Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat dari realisasi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra 2017-2022, yakni sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo Kabupaten Barito Kuala s/d Tahun 2018

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET RENSTRA 2017-2022 | RENCANA TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 | TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 (n-2) | PERKIRAAN TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 (n-1) |
|--|--|---|--------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Layanan Telekomunikasi yang merata di semua wilayah | Meningkatnya cakupan layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala | Persentase cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala | 100 | 68,85 | 47,78 | 53,42 |
| Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas penyebaran informasi public secara merata | Meningkatnya Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Barito Kuala | Persentase penyebaran informasi kepada masyarakat | 100 | 30,79 | 9,73 | 12,08 |
| Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) di Kabupaten Barito Kuala | Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) di Kabupaten Barito Kuala | Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) | 3,5 | 1,5 | 1 | 2 |

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance. Salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi komunikasi dan informasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut;

1. Masih banyak daerah-daerah yang terisolir/blank spot serta belum mendapatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi terutama pada sentra-sentra perekonomian yang ada di Kabupaten Barito Kuala;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang baik secara kualitas dan kuantitas
3. Belum adanya kebijakan yang kuat guna mendukung implementasi e-Government, sulitnya koordinasi kelembagaan, dan belum adanya aplikasi perencanaan berdasarkan penilaian berkala.
4. Belum adanya kegiatan di bidang persandian karena bidang itu baru berlaku setelah ditetapkannya PD baru.
5. Belum adanya kegiatan di bidang statistik karena bidang itu baru berlaku setelah ditetapkannya PD Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dengan berbagai permasalahan dan hambatan di atas menyebabkan masih belum maksimalnya produk perencanaan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals).

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan serta memperhatikan masukan atau saran dari masyarakat, baik disampaikan secara langsung melalui Musrenbang, maupun secara tertulis.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka menciptakan masyarakat informasi yang sejahtera, berbudaya dan berbasis pengetahuan, maka diperlukan arah pembangunan yang jelas di bidang komunikasi dan informatika. Informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara, sesuai dengan kondisi alam dan budaya, sehingga merupakan aset yang sangat berharga.

Peran pemerintah sangat diharapkan dalam upaya terbentuknya masyarakat Indonesia yang informatif. Dengan arah kebijakan yang tepat, sangat besar harapannya bidang komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat pengetahuan tersebut.

Dalam konteks ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2014-2019, maka Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu sebagai berikut :

"Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI"

Makna yang terkandung dalam rumusan Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut di atas yaitu:

- 1) *Terwujudnya Indonesia Informatif*, adalah suatu karakteristik bangsa yang bercirikan antara lain sudah menyadari, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan serta menyebarkan informasi, dan menjadikan informasi sebagai nilai tambah dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
- 2) *Masyarakat sejahtera*, adalah keadaan sentosa dan makmur, selamat, mampu menghadapi segala macam gangguan. Sentosa mengandung arti berada dalam keadaan aman dan tenteram, sedangkan makmur dapat diartikan sebagai

keadaan serba berkecukupan atau tidak berkekurangan. Jadi sejahtera tidak hanya memiliki dimensi fisik atau materi tetapi juga dimensi rohani.

- 3) *Pembangunan kominfo berkelanjutan*, adalah pembangunan komunikasi dan informatika yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan keseimbangan kebutuhan masyarakat pengguna.
- 4) *Pembangunan kominfo yang merakyat* adalah ketepatan sasaran pembangunan kominfo kepada masyarakat pengguna dan keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan, memanfaatkan, mengolah dan mengakses informasi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan daya saing bangsa.
- 5) *Pembangunan kominfo yang ramah lingkungan* adalah penyelenggaraan pembangunan bidang komunikasi dan informatika secara terintegrasi yang didukung oleh konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang ramah lingkungan.
- 6) *NKRI*, yaitu Negara KeOrganisasi Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang menjadi cita-cita bersama dan harus diupayakan dengan sungguh-sungguh.

Sementara rumusan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI;
2. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi;
3. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa;
4. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan;
5. Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global.

Tahun 2018 merupakan tahun pertama masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala dalam mencapai visi jangka menengah 2017 -2022 yaitu :

“Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara) “

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala 2017 – 2022 telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan Tahun 2018, yaitu :

1. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui diversifikasi dan penerapan teknologi pertanian
3. Meningkatkan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan berkualitas, terjangkau dan memadai untuk mewujudkan SDM yang berdaya saing

Secara khusus untuk mendukung peningkatan kualitas infrastruktur perdesaan dan perkotaan, Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya untuk memberikan kontribusi melalui penyiapan dan penyediaan infrastruktur Komunikasi, informatika, statistik dan persandian

Disamping itu untuk mendukung Misi Keempat Kabupaten Barito Kuala, yaitu, Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani, Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terakomodir pada rencana kerja (Program/Kegiatan) tahun 2018 ini.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Barito Kuala mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja.

Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Berdasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kominfo, maka Tujuan dan sasaran Renja Diskominfo Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Diskominfo Tahun 2018

| Tujuan | Sasaran |
|--|--|
| Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Layanan Telekomunikasi yang merata di semua wilayah | Meningkatnya cakupan layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala |
| Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas penyebaranluasan informasi public secara merata | Meningkatnya Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Barito Kuala |
| Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) di Kabupaten Barito Kuala | Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) di Kabupaten Barito Kuala |

3.2.1 Sasaran dan Arah Kebijakan Bidang Komunikasi dan Informatika

Kebijakan pembangunan bidang Komunikasi dan Informasi diarahkan bagi peningkatan mutu pelayanan timbal balik dan arus informasi kepada dan dari masyarakat. Tujuannya untuk mendukung sosialisasi dan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Kebijakan untuk mencapai sasaran adalah:

1. Fasilitasi penyediaan infrastruktur layanan telekomunikasi dan akses informasi publik.
2. Penambahan frekuensi penyebaran dan kualitas informasi publik.
3. Mewujudkan penerapan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government).

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada rencana kerja Tahun 2018 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala 2017 – 2022. Dalam mencapai sasaran strategis ini terdapat 7 program yang dirumuskan dalam rencana kerja Tahun 2018 yaitu :

Bagian sekretariat

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik
- c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Operasional
- d) Penyediaan alat tulis kantor
- e) Penyediaan barang cetak dan penggandaan

- f) Penyediaan makanan dan minum
- g) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Pengadaan peralatan gedung kantor
- b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b) Penyusunan laporan keuangan Semesteran
- c) Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
- d) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- a) Penyelenggaraan Pameran Investasi/promosi daerah

Bidang Kominfo

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

- a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
- b) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika

- c) Kajian Efektivitas Pengelolaan Arus Informasi dan Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan

2. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

- a) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
- b) Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2018 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1) | | | |
|------|---|---------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|---------------------|---|-------------------------------|-------------------|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | | |
| 0 | Non Urusan | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | - | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | SKPDJasa surat menyurat | 400 Buah | 12,600,000 | Pendapatan Daerah | 0 Buah | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | SKPD | Biaya listrik, air, dan telepon | 12 Bulan | 38,000,000 | Pendapatan Daerah | 0 Bulan | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | SKPD | Pemeliharaan kendaraan bermotor | 4 Unit | 25,000,000 | - | 0 Unit | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | Penyediaan alat tulis kantor | 30 Jenis | 16,000,000 | Pendapatan Daerah | 0 Jenis | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | SKPD | Barang cetakan dan penggandaan | 10 Jenis | 15,000,000 | Pendapatan Daerah | 0 Jenis | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | SKPD | Penyediaan bahan bacaan koran, 2 SKH Penyediaan bahan buku bacaan | 12 bulan 10 buku | 5,000,000 | Pendapatan Daerah | 0 bulan 0 buku | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | Makanan dan minuman harian, tamu, rapat dan kegiatan | 4.761 porsi | 25,000,000 | Pendapatan Daerah | 0 porsi | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|--|---|---|------------|-------------|-------------------|--|-----------|---|
| 0 | 0 | 1 | 18 | Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Cerbon, Tabungan en, Belawang, Tabukan, Barambai, Rantau Badauh, Bakumpai, Mekarsari, Anjir Pasar, Marabahan, Mandastana, Anjir Muara, Kuripan, Wanaraya, Alalak, Jejangkit, Tamban | Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 85 OH / OK | 130,000,000 | Pendapatan Daerah | | 0 OH / OK | 0 |
| 0 | 0 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 2 | 5 | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | SKPD | Pengadaan kendaraan roda dua dan roda empat | 7 Unit | 0 | Pendapatan Daerah | | 0 Unit | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 7 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | SKPD | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | 6 Jenis | 40,000,000 | Pendapatan Daerah | | 0 Jenis | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 9 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | SKPD | Peralatan kantor | 11 Jenis | 223,060,000 | Pendapatan Daerah | | 0 Jenis | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 10 | Pengadaan Mebeleur | SKPD | Meja dan kursi kerja | 40 Buah | 50,000,000 | Pendapatan Daerah | | 0 Buah | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 22 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | SKPD | Petugas pemeliharaan gedung kantor | 24 OB | 30,000,000 | Pendapatan Daerah | | 0 OB | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|---|-----------|--|---------------|------------|-------------------|--|----------|---|
| 0 | 0 | 2 | 28 | Pemeliharaan Rutin Berkala peralatan Gedung Kantor | SKPD | Pemeliharaan gedung kantor | 6 Jenis | 20,000,000 | - | | 0 Jenis | 0 |
| 0 | 0 | 5 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 5 | 1 | Pendidikan dan pelatihan formal | | Jumlah Aparatur Mengikuti Bintek | 8 OH | 96,000,000 | - | | 0 OH | 0 |
| 0 | 0 | 6 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 6 | 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | SKPD | Jumlah penggandaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Laporan Semesteran dan Akhir Tahun | 20.000 Lembar | 7,000,000 | Pendapatan Daerah | | 0 Lembar | 0 |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 18 | | | Penanaman Modal | | | | | | | | |
| 4 | 18 | 15 | | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | | | | | | | | |
| 4 | 18 | 15 | 10 | Penyelenggaraan Pameran Investasi / Promosi Daerah | Kabupaten | Pembuatan stand pameran Diskominfo * | 1 Buah | 15,000,000 | Pendapatan Daerah | | 0 Buah | 0 |
| 4 | 16 | | | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | |
| 4 | 16 | 15 | | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|--|-----------|---|-------------|---------------|-------------------|--|-----------|---|
| 4 | 16 | 15 | 2 | Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika | Kabupaten | Mengembangkan jaringan komunikasi dan informasi pada instansi pemerintah daerah * | 12 Bulan | 2,335,000,000 | Pendapatan Daerah | | 0 Bulan | 0 |
| 4 | 16 | 15 | 3 | Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi | Kabupaten | Sosialisasi / Bintek / Workshop * | 200 Peserta | 100,000,000 | Pendapatan Daerah | | 0 Peserta | 0 |
| 4 | 16 | 15 | 6 | Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi | | Penyusunan Peraturan Daerah * | 2 Dokumen | 100,000,000 | Pendapatan Daerah | | 0 Dokumen | 0 |
| 4 | 16 | 16 | | Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi | | | | | | | | |
| 4 | 16 | 16 | 1 | Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi | Kabupaten | Review Rencana Induk Pengembangan Smart City, Penyusunan Detail Engineering Desain Jaringan e-Gov, Penyusunan buku statistik sektoral Tahun 2018 Kabupaten Barito Kuala | 3 Dokumen | 150,000,000 | Pendapatan Daerah | | 0 Dokumen | 0 |
| 4 | 16 | 17 | | Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi | | | | | | | | |
| 4 | 16 | 17 | 1 | Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi | | Pelatihan SDM dalam bidang kominfo * | 12 OK | 144,000,000 | Pendapatan Daerah | | 0 OK | 0 |
| 4 | 16 | 18 | | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|---|-----------|---|-------------|----------------------|-------------------|--|-----------|----------|
| 4 | 16 | 18 | 2 | Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah | Kabupaten | Pengelolaan website kabupaten dan diseminasi informasi nasional * | 12 Bulan | 208,880,000 | Pendapatan Daerah | | 0 Bulan | 0 |
| 4 | 16 | 18 | 3 | Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat | Kabupaten | Sosialisasi Internet Sehat dan Kelompok Informasi Masyarakat * | 120 Peserta | 200,000,000 | Pendapatan Daerah | | 0 Peserta | 0 |
| | | | | | TOTAL | | | 3,855,540,000 | | | | 0 |

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan PD yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis PD. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan PD.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala selama Tahun Anggaran 2018, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin.

Dalam mengantisipasi dan meminimalkan kendala yang terjadi, maka strategi pemecahan masalah yang digunakan di masa yang akan datang adalah:

- 1) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, dengan segala keterbatasannya serta sarana lain yang mendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- 2) Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat selain sosialisasi dan publikasi hasil pembangunan serta kebijakan Pemerintah Kabupaten bahwa pentingnya memiliki ijin-ijin, agar terwujudnya ketertiban umum, baik administrasi maupun non administrasi
- 3) Melakukan pengawasan di lapangan serta mengadakan bimbingan atau penyuluhan kepada masyarakat termasuk sekolah-sekolah dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- 4) Mengoptimalkan tenaga teknis yang terampil di berbagai bidang multimedia Di samping itu untuk meminimalkan kendala yang dihadapi maka jalan yang akan ditempuh antara lain:
 - a) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara efektif dan efisien

- b) Menyusun dan melaksanakan seluruh jadwal kegiatan secara tepat
- c) Secara bertahap mengadakan penyempurnaan strategi melaksanakan kegiatan
- d) Menyempurnakan penyusunan anggaran agar teralokasi secara baik
- e) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lebih intensif.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi Kabupaten, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Marabahan, 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA

AKHMAD WAHYUNI, S.Sos, M.IP
NIP. 19650501 198602 1 007